I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga nasional termasuk pula percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi, pengurangan, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 2000 : 163). Sedangkan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk, 2008 : 27).

Menurut Chambers (1987 : 145-148) kemiskinan dianggapnya sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan lebih tepat disebut sebagai perangkap kemiskinan *(deprivation trap)* yang terdiri dari lima unsur penyebab kemiskinan yang saling terkait yaitu : ketidakberdayaan *(powerlessness)*, kerawanan atau kerentanan *(vulnerability)*, kelemahan fisik *(physical weakness)*, kemiskinan *(poverty)*, dan isolasi *(isolation)*. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Dalam arti luas, Chambers (dalam Suryawati, 2005 : 1) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*poverty*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) . ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut BPS (2012), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

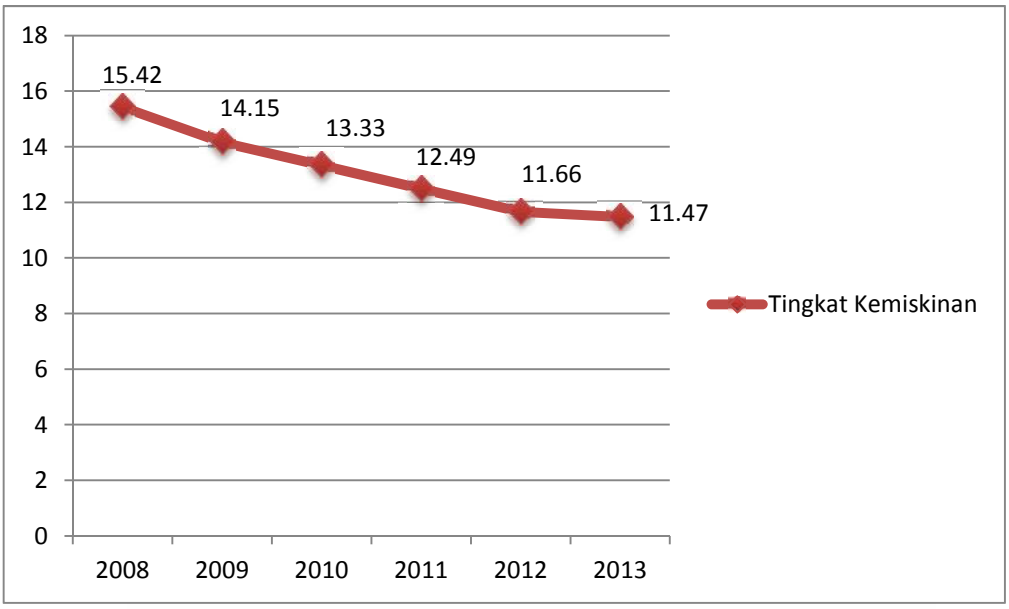

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2008-2013 (persen)
Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2013

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2008 hingga tahun 2013 mengalami kecenderungan yang menurun, seperti terlihat pada Gambar 1. Pada periode tahun 2008 sampai 2013 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 15,42 persen pada tahun 2008 menjadi 11,47 pada tahun 2013. Penurunan ini disebabkan tren perekonomian Indonesia yang relatif tumbuh dan perekonomian yang terus membaik dari waktu ke waktu (BPS, 2013).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu lima tahun (2009-2014) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009-2014. Kebijakan disusun agar strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis, dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai

suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi Lampung. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dilaksanakan melalui strategi utama penanggulangan kemiskinan yaitu sebagai berikut ; 1) Strategi pemenuhan kebutuhan dasar, 2) Strategi memperbaiki program perlindungan sosial, 3) Strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, 4) Strategi pembangunan inklusif, 5) Strategi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, 6) Strategi reorientasi kebijakan (Bappeda Lampung, 2013).

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami pola yang menurun. Gambar 2 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 tingkat kemiskinan sebesar 20,93 persen dan turun menjadi 14,39 persen di tahun 2013(Badan Pusat Statistik, 2013).

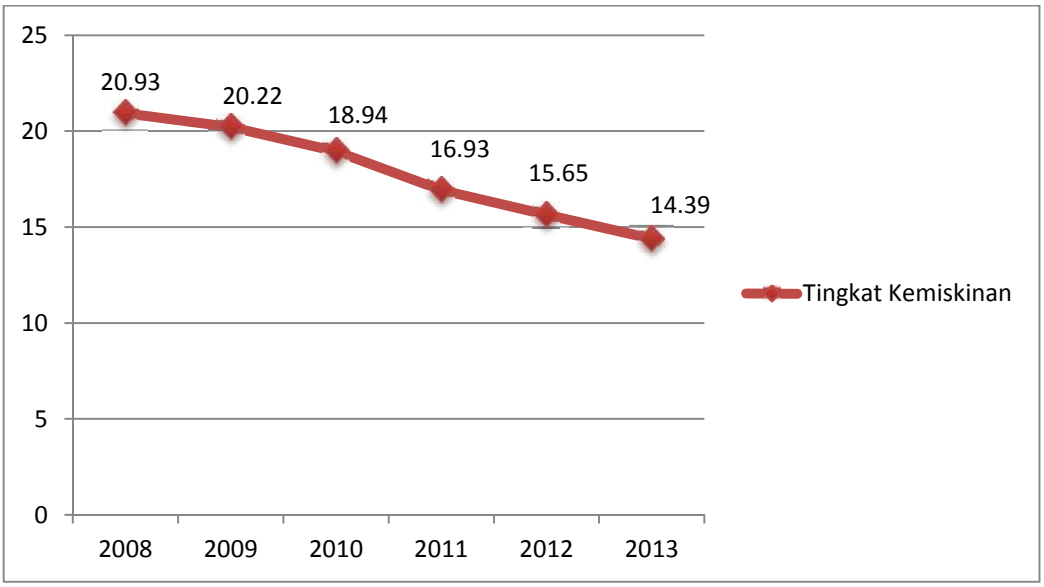

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2008-2013 (persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013

Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Gambar 3 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 14 Kabupaten/kota masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi diantara kabupaten/kota yang lainnya di Provinsi Lampung.

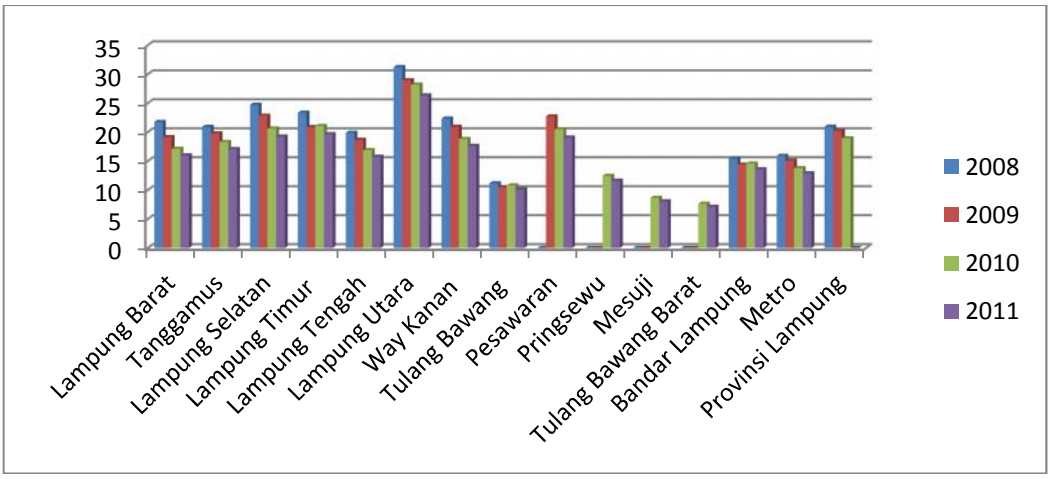

Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2008-2011

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2012

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2012, tingkat kemiskinan di kabupaten Lampung Utara merupakan tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pada tahun 2008 tingkat kemiskinan di kabupaten Lampung Utara mencapai 31,24 persen tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Meskipun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tingkat kemiskinan di kabupaten Lampung Utara mengalami penurunan, tetapi ini menjadi masalah yang perlu perhatian lebih mengingat tingkat kemiskinan di kabupaten Lampung Utara masih tinggi atau diatas tingkat kemiskinan Provinsi Lampung dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Persentase penduduk miskin yang cukup tinggi di kabupaten Lampung Utara di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung mengidentifikasikan bahwa perlu usaha yang signifikan dan terarah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Upaya dan kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kegiatan yang perlu berjalan secara simultan dan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait secara terpadu. Dalam kurun waktu 5 tahun upaya dan kebijakan tersebut telah meghasilkan perkembangan yang positif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar 4 tren penurunan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

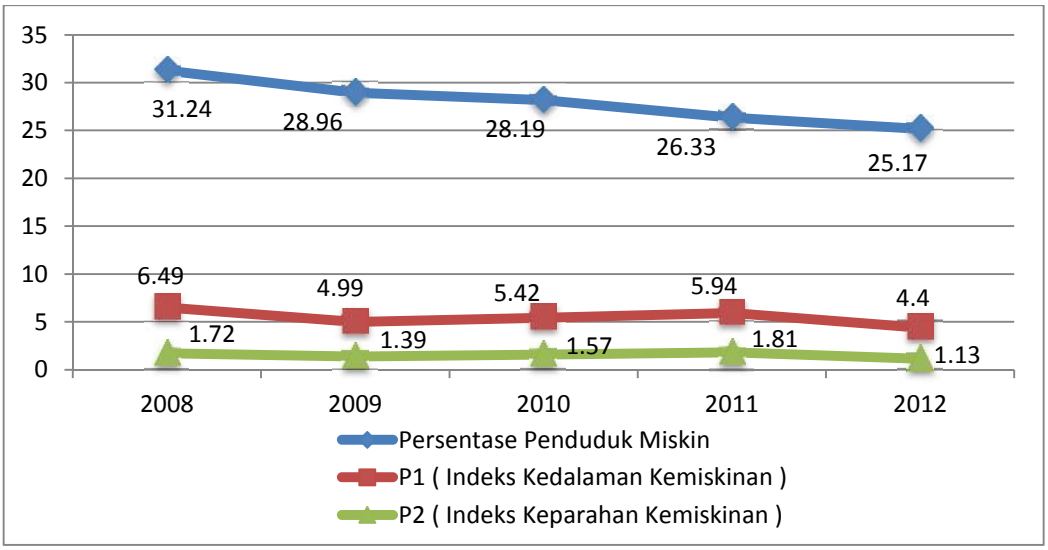

Gambar 4.Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Lampung Utara tahun 2008-2012

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Utara, 2014

Persentase penduduk miskin pada tahun 2008 mencapai sekitar 31,24 persen. Angka ini pada tahun 2012 menurun sekitar 6,07 persen hingga menjadi sekitar 25,17 persen. Selama periode 2008-2012, penurunan rata-rata persentase penduduk miskin per tahun sekitar 1,21 persen.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2008 mencapai sekitar 6,49. Angka ini pada tahun 2012 menurun sekitar 2,09 hingga menjadi sekitar 4,40.

Selama periode 2008-2012, penurunan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan per tahun sekitar 0.41.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2008 mencapai sekitar 1,72. Angka ini pada tahun 2012 menurun sekitar 0.59 hingga menjadi sekitar 1,13. Selama periode 2008-2012, penurunan rata-rata indeks keparahan kemiskinan per tahun sekitar 0.11.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009 : 23).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan *(necessary condition)* bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karja. Adapun secara

tidak langsung, diperlukan pemerintah yang yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008 : 27).

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009 : 163) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan.

Gambar 5 menunjukkan bahwa sampai tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari 5,44 persen di tahun 2010 menjadi 6,03 persen di tahun 2012. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan kecenderungan penurunan penduduk miskin dari tahun ke tahun. yakni 28,19 persen di tahun 2010 dan turun menjadi 25,17 persen di tahun 2012 (BPS Lampung Utara 2013).

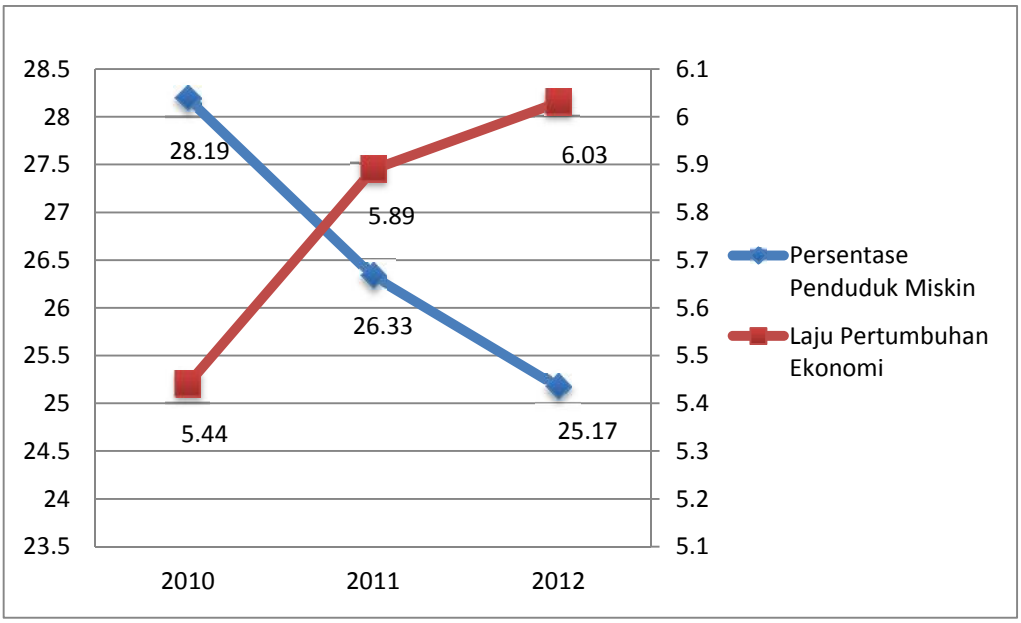

Gambar 5.Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2012 (persen)

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara, 2013 *(diolah)*

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono, 2003 : 141).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan

yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak diekspolitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan .

KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik fisik, non fisik, dan sosial selama satu bulan. Seorang pekerja dianggap hidup layak jika upahnya mampu memenuhi kebutuhan 3000 kalori per hari. Oleh karena itu, KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Ada 7 komponen KHL yang selalu dihitung, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa sampai tahun 2008 tingkat upah minimum regional di Kabupaten Lampung Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 tingkat upah minimum sebesar Rp.617.000 kemudian naik menjadi Rp. 691.000 di tahun 2009 dan Rp. 767.500 di tahun 2010. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2012, dari Rp. 983.000 di tahun 2013 menjadi Rp. 1.160.000.

Tabel 1. Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008-2013 (Rupiah)

Tahun	UMR
2008	617.000
2009	691.000
2010	767.500
2011	855.000
2012	983.000
2013	1.160.000

Sumber : BPS Lampung Utara

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia *(human capital)* dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu dan Bonar, 2004 : 360).

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidkan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan

SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat, agar mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Suryawati, 2005 : 121).

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008 : 359) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Utara selama ini telah dilakukan melalui upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tujuan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja, dengan memperhatikan sistem pendidikan nasional yang berjalan dan juga sasaran komitmen-komitmen Internasional di bidang pendidikan. Akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi murni (APM) SD/MI 97,41 % menjadi 91,17 %, SMP/MTS dari 71,08 % menjadi 71,00 % dan SMA/MA/SMK meningkat dari 32,01 % menjadi 46,88 % serta proporsi penduduk melek huruf dari 95,23 % menjadi 95,71 % masing-masing pada tahun 2008 dan tahun 2012 (BPS Lampung Utara, 2013).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh *(full employment)* dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno, 2004 : 28).

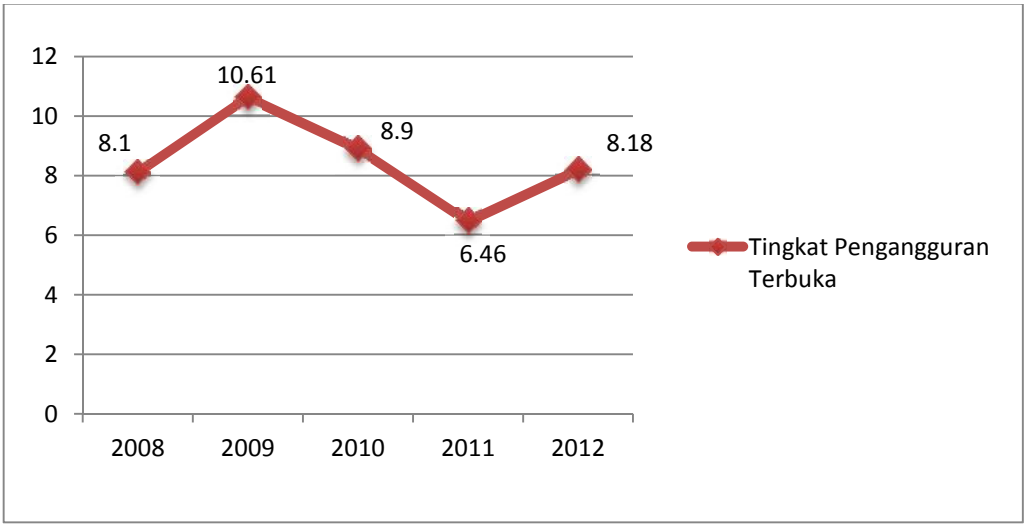

Gambar 6. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008-2012 (persen)
Sumber: BPS Lampung Utara, 2013

Gambar 6 menunjukkan tingkat pengangguran di Kabupaten Lampung Utara tergolong masih tinggi, dimana masih dalam kisaran diatas 5 persen. Tingkat pengangguran di Lampung Utara tidak stabil, mengalami beberapa kali fase naik turun atau berfluktuasi. Pada tahun 2008, tingkat pengangguran sebesar 8,1 persen, kemudian naik menjadi 10,61 persen di tahun 2009. Pada tahun 2010 dan

2011 tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 6,46 persen dan di tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi 8,18 persen.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara“**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara ?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

2. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.
3. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.
4. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
2. Penelitian ini menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.
3. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti, mahasiswa dan dosen yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang sistematis:

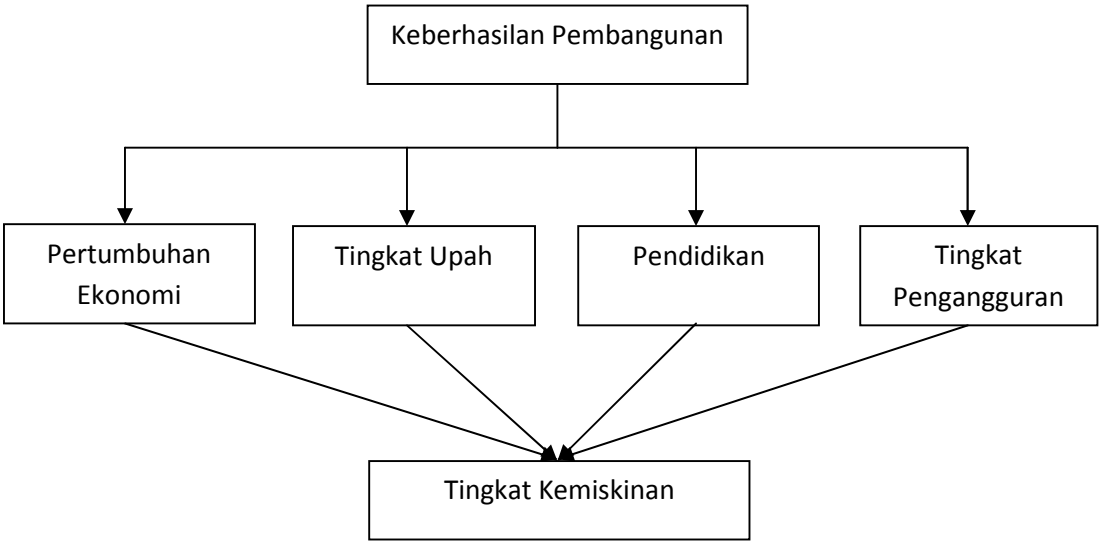

Gambar 7. Model Kerangka Pemikiran

Memperhatikan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang lazim digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika mampu menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan miskin. Semakin banyak golongan miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraannya akan meningkat dan lepas dari kemiskinan.

Tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja. Upah minimum mencerminkan pendapatan yang diterima pekerja, adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penetapan upah minimum yang pantas dan tepat diharapkan

mendorong penduduk yang berada dibawah kemiskinan mampu hidup layak sehingga tingkat kemiskinan akan turun.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Kondisi menganggur menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan yang telah dicapai akan semakin merosot. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.
2. Diduga variabel upah minimum regional berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.
3. Diduga variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.
4. Diduga variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika bab yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Studi Pustaka, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Hasil dan Pembahasan serta BAB V Simpulan dan Saran.

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan fakta serta pengamatan yang menggambarkan permasalahan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan teoritis dan tinjauan empirik yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Merupakan metode penelitian, berisi tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Merupakan hasil dan pembahasan, berisi tentang deskriptif objek penelitian, analisis ddata yang menjelaskan estimasi sarta pembahasan yang menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Simpulan dan Saran

Merupakan simpulan hasil analisis data pembahasan, dalam bagian ini juga berisi keterbatasan dan saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak- pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.